



AHLUDDIN SAIFUL AHMAD, S.H., M.H.

**MODUL
PENDIDIKAN PANCASILA**

**e-Learning Universitas Esa Unggul
2018**

BAB V PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

PENGANTAR

Pada bagian kelima, bahasan tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, dilakukan dalam dua kali tatap muka dan dua kali pembelajaran on line. Pembelajaran Online sesi pertama berkaitan dengan pokok bahasan ini akan membahas mulai dari Pendahuluan sampai dengan Memaknai Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila. Pada pertemuan pembelajaran on line kedua, pokok bahasan adalah Nilai Sila-Sila dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat.

PENDAHULUAN

Untuk mengawali pembahasan dalam Bab V ini, mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, penulis mengutip apa yang telah dikemukakan Soediman Kartohadiprojo sebagaimana telah dikutip oleh Sri Soemantri sebagai berikut:

Apakah sebabnya dan apakah artinya kalau ia (maksudnya Ir. Soekarno) berkata bahwa filsafat Pancasila ini berjiwa kekeluargaan?

Ini disebabkan, karena pertama-tama Pancasila ini untuk pertama kali disajikan kepada khalayak ramai sebagai *dasar filsafat negara Republik Indonesia yang kelak akan didirikan*.

Karena negara itu adalah manusia – tiada negara tanpa manusia – maka filsafat Pancasila ini diterapkan pada kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia yang didasari filsafat Pancasila, jadi Bangsa Indonesia itu melihatnya sebagai suatu kehidupan kekeluargaan.¹

Dari apa yang dikemukakan di atas menjadi dasar dalam pembahasan pada bab ini. Salah satu hal yang menarik dari kutipan di atas adalah “Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia”. Berdasarkan kutipan tersebut maka pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bab ini tidak hanya dibahas dari sisi filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai bagaimana sesungguhnya makna dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Dari pendapat Soediman di atas dapat kita lihat bahwa negara itu adalah manusia. Hal tersebut sangat menarik karena Soediman tidak melihat negara pada sisi teritorial, pemerintahan atau bahkan tatanan hukumnya, tetapi menitik beratkan pada sisi manusianya. Melihat negara Indonesia maka sejatinya kita sedang melihat manusia-manusia Indonesia. Membahas mengenai negara Indonesia, maka kita sebenarnya sedang membahas mengenai manusia-manusia Indonesia.

Lebih lanjut, penulis mengajak para pembaca memaknai pembahasan dalam bab ini dalam kedudukannya sebagai negara Indonesia, yang artinya sebagai manusia-manusia Indonesia. Memaknai pembahasan dalam bab ini tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga memaknai secara filsafati bagaimana Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

¹ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 3.

A. Kajian Mengenai Term Filsafat dan Term Sistem

Pembahasan pertama berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mengenai term filsafat dan term sistem. Hal ini diperlukan agar kita mempunyai panduan yang jelas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dalam bagian ini. Yang pertama kita akan mengkaji mengenai filsafat, baru kemudian mengkaji mengenai sistem sebagai dasar pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat.

1. Pengertian Filsafat

C.S.T. Kansil menjelaskan mengenai pengertian filsafat dengan menelusuri pengertian filsafat dari asal muasal pembentukan kata filsafat sebagai berikut:

Perkataan dan istilah filsafat di dalam bahasa Arab ialah *falfasah*. Secara etimologi perkataan falsafah berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, yang terdiri atas dua suku kata, yakni *philen* artinya: "mencari" atau "mencintai" dan *sophia*, artinya "kebenaran" atau "kebijaksanaan".²

Dalam literatur yang lain menyebutkan bahwa filsafat terbentuk dari kata "*philos*" dan "*sophia*" atau "*philos*" dan "*shopos*". Namun secara semantis kesemuanya mengandung makna yang sama.³

Lebih lanjut, Menurut Muhammad Yamin, sebagaimana yang dikutip C.S.T. Kansil perkataan Yunani *philosophos* itu mula-mula dibentuk karena hendak menandingi kata *sophos*, yang berarti "Si tahu" atau "Si pandai" karena merasa telah memegang kebenarannya dalam gengamannya. Sedangkan *philosophos* dalam segala kerendahan hati hanya mencintai dan masih bergerak di tengah jalan menuju kebenaran."⁴

Dari beberapa pendapat di atas kita dapat mengetahui bahwa filsafat secara arti katanya adalah mencintai kebijaksanaan. Penelusuran etimologis terhadap arti kata filsafat di atas belum membawa kita kepada pemahaman bagaimana atau bahkan sekedar pada apa filsafat itu, untuk itu selanjutnya akan disajikan usaha para pakar dalam mendefinisikan filsafat.

Gazalba sebagaimana dikutip oleh Kaelan menjelaskan lebih lanjut apa sebenarnya yang dimaksud dengan mencintai kebijaksanaan (filsafat). Menurut Gazalba *philosophia* menurut arti katanya berarti cinta pada pengetahuan yang bijaksana oleh karena itu mengusahakannya.⁵

Dari apa yang dikemukakan Gazalba di atas kita mulai mengetahui bahwa filsafat berhubungan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan ada hubungannya dengan kegiatan berpikir. Sementara kita dapat simpulkan bahwa filsafat berhubungan

² C.S.T. Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan XIX, 2000, Hlm. 65.

³ Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, hlm.49.

⁴ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁵ Kaelan, *Loc.cit*

dengan kegiatan berpikir. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan berpikir yang bagaimana yang termasuk dalam filsafat.

Muhammad Yamin sebagaimana dikutip oleh Kansil mengemukakan bahwa, "Filsafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan".⁶ Dari pendapat tersebut kita dapat mengetahui bahwa filsafat adalah upaya pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran dapat diartikan sebagai upaya memusatkan pikiran kita pada suatu objek dengan cara yang sungguh-sungguh. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa filsafat merupakan kegiatan berpikir secara mendalam dan konsisten terhadap suatu objek.

Louis O. Kattsoff dalam usahanya menjelaskan apa itu filsafat tidak dengan cara memberikan definisi di awal pembahasan. Dalam Mengawali Pembahasannya Kattsoff merangsang pikiran pembacanya dengan mengemukakan hal sebagai berikut:

Orang mengatakan bahwa filsafat 'tidak membuat roti'. UCapan ini sepenuhnya benar. Filsafat tidak membuat memberi petunjuk-petunjuk untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, juga tidak melukiskan teknik-teknik baru untuk membuat bom atom. Sebenarnya jika di dalam filsafat anda mencari jawaban *terakhir* terhadap persoalan yang anda hadapi, yakni jawaban yang disepakati semua filsif sebagai *hal yang benar*, maka anda akan kecewa dan bersedih hati. setelah lama mempelajarinya, anda dapat mjdulai menyusun suatu sistem filsafat yang di dalamnya anda dapat menempatkan persoalan-persoalan yang anda hadapi dan memberikan jawaban-jawaban yang kiranmya sah.

Dalam memberikan pemahaman mengenai filsafat, Louis O. Kattsoff melakukannya dengan mengantarkan para pembaca dengan beberapa pembahasan dengan menguraikan pokok-pokok pikiran antara lain seperti di bawah ini:

- a. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan tindakan;
- b. Keinginan kefilsafatan ialah pemikiran secara ketat;
- c. Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis;
- d. Filsafat merupakan pemikiran secara rasional;
- e. Filsafat senantiasa bersifat menyeluruh (komprehensif);
- f. Filsafat mengajukan kritik atas makna yang dikandung fakta-fakta;⁷

Sampai pada akhir pembahasan mengenai apa itu filsafat, Louis O. Kattsoff tidak memberikan secara jelas pendapatnya mengenai definisi filsafat. Sampai akhir pembahasannya baru kemudian pembaca menyadari bahwa pembaca sudah dihantarkan untuk berpikir secara mendalam mengenai apa itu filsafat apabila sungguh-sungguh membaca dan berusaha memahami apa yang dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff. Apabila tidak membaca dan berusaha memahami secara sungguh-sungguh maka pembaca hanya akan merasa bahwa apa ia telah melakukan sesuatu yang sia-sia karena tidak mendapatkan apa yang dicari. Dari pembacaan dan apa yang penulis rasakan terhadap penjelasan Louis O. Kattsoff, penulis berkesimpulan bahwa filsafat merupakan usaha pemikiran yang mendalam, sistematis, menuju pencapaian berupa kebenaran, dengan metode-metode yang benar dan konsisten,

⁶ C.S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 66

⁷ Louis O, Kattsoff, 2004, *Pengantar Filsafat*, Cetakan IX, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 3-15.

dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala kemampuan berpikir yang dimiliki. Setidaknya hal tersebut yang telah dirasakan oleh penulis.

2. Pengertian Sistem

Kata "sistem" berarti sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud, misalnya, sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya.⁸ Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwa saat kita berbicara mengenai sistem maka sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian. Sistem bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal. Pertanyaan kemudian adalah bagian-bagian yang seperti apa yang akhirnya bisa bekerjasama dan membentuk sebuah sistem.

Lebih lanjut Attamimi mengutip pendapat Henry Campbell Black sebagai berikut:

System dalam bahasa Inggris juga merupakan "kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan, khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu" (*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole, especially such combination according to some rational principle*).⁹

Dari pendapat di atas dapat kita maknai bahwa bagian-bagian yang dimaksud salah satunya dapat berupa bagian-bagian atau elemen-elemen pembentuknya yang kemudian menjadi satu kesatuan sebagai keseluruhan sistem yang saling berhubungan sebagai sebuah kombinasi dengan prinsip-prinsip rasional tertentu.

Untuk lebih dapat memahami tentang sistem, Kaelan mengutip pendapat Shore dan Voicb sebagai berikut:

Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- 3) Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- 4) Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
- 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.¹⁰

Apa yang dikemukakan oleh Kaelan di atas menghantarkan pemahaman yang lebih terang kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan sistem. Untuk itu pembahasan akan dilanjutkan menuju Pancasila sebagai Sistem Filsafat pada bagian berikutnya.

⁸ A.Hamid S.Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.110.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kaelan, *Op.cit*, hlm 51-52.

B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Para ahli dan guru kita dalam beberapa literatur telah membahas bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat secara jelas dan terperinci. Dalam pembahasannya mengenai sistem filsafat para ahli dan guru kita mengkaji mengenai aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Untuk itu kita akan membahas secara singkat mengenai dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila dalam Pancasila.

1. Dasar Ontologis Pancasila

Dasar Ontologis Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.¹¹

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*. Objek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.¹² Ciri-ciri dasar dalam setiap sila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang *dwi-tunggal*. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia, artinya eksistensi sifat dan kualitas.

Jika ditinjau dari sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara, yaitu berupa materi (*causa material*), bentuk (*causa formalis*), tujuan (*causa finalis*) dan asal muasal karya (*causa efficient*). Untuk lebih jelas akan dibahas satu persatu sebab (*causa*) yang dimaksud oleh Notonagoro sebagai berikut:

- a. Sebab yang berupa materi (*causa material*)
Mengenai *causa material* Notonagoro menjelaskan bahwa sebagai asal mula bahan (*causa material*) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
- b. Asal mula bentuk atau bangun (*causa formalis*)
Mengenai hal ini Notonagoro mengemukakan bahwa seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka (BPUPKI) yaitu Bung Karno yang selanjutnya beresama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara menjadi dasar *causa formalis*.

¹¹ Syahril Syarbaini dan Aliaras Wahid, 2018, *Pendidikan Pancasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta

¹² Kaelan, *Op.cit*, hlm. 56.

- c. Asal mula tujuan (*causa finalis*)
Mengenai *causa finalis* dapat dilihat bahwa pada proses menuju kemerdekaan dalam pembahasan-pembahasan persiapan kemerdekaan Pancasila diterima sebagai calon dasar filsafat negara .
- d. Asal mula karya (*causa efficient*)
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadikan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yang dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya asih berstatus sebagai Calon Dasar Filsafat Negara.

2. Dasar Epistemologis Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga berupa suatu sistem pengetahuan. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multi-kultur, dan multi-etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam melihat realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan dan kehidupan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu: *pertama*, tentang sumber pengetahuan manusia, *kedua* tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, *ketiga* tentang watak pengetahuan manusia. Mengenai hal tersebut Kelarn mengemukakan hal sebagai berikut:

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan Pengetahuan Pancasila. Tentang *sumber pengetahuan Pancasila*, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kausa material Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai dan adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religius maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu pengetahuan memiliki kesesuaian yang *bersifat korespondensi*. Berikutnya tentang *susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan*. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 61

Susunan Pancasila sebagaimana dimaksud oleh Kaelan di atas adalah bahwa susunan kesatuan sila-sila dalam Pancasila bersifat hierarkhis dan piramidal. Susunan Pancasila bersifat hierarkhis dalam artian bahwa sila yang mempunya kedudukan di atas mendasari dan menjiwai sila-sila yang kedudukannya ada di bawahnya. Sila yang berkedudukan di bawah, didasari dan dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang berkedudukan di atasnya.

3. Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (*given value*) melainkan nilai-nilai yang diciptakan (*created value*) oleh manusia Indonesia.

Sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, namun nilai-nilai itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan serta saling melengkapi. Hal ini sebagaimana kita pahami bahwa sila-sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh atau merupakan suatu kesatuan organik bertingkat dan berbentuk piramidal.

Nilai-nilai Pancasila berhubungan secara erat nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola atau patron bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila dalam Pancasila., yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila satu dan lainnya dalam Pancasila itu saling mengkualifikasi saling berkaitan dan berhubungan erat. Adanya sila yang satu mengkualifikasi adanya sila lainnya. Dalam pengertian yang demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai, dalam artian bahwa bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-turut nilai ketuhanan adalah nilai yang tertinggi karena nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak. Berikutnya nilai kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan nilai ketuhanan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi daripada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila lainnya yaitu sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila yang dimaksud berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nilai persatuan dipandang dipandang dari tingkatannya lebih tinggi dari nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial, karena persatuan adalah syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya keadilan;

- 2) Nilai kerakyatan yang didasari nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai keadilan sosial karena kerakyatan adalah sebagai sarana terwujudnya keadilan sosial;
- 3) Nilai keadilan merupakan tujuan dari keempat nilai yang berkedudukan di atasnya.

Selanjutnya pembahasan akan dilakukan dengan menerapkan langsung apa yang telah dikemukakan oleh para ahli dan guru kita sebelumnya.¹⁴

Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid memberikan penjelasan Pancasila sebagai filsafat sebagai berikut:

Pancasila sebagai sebuah filsafat, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila.¹⁵

Untuk memahami apa yang dikemukakan Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid tersebut maka kita akan membahasnya langkah demi langkah berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai filsafat dan sistem. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai filsafat dan sistem maka kita akan memaknai Pancasila sebagai sistem filsafat ke dalam dua tahapan.

Pertama, memaknai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan menitik beratkan pada pemaknaan pada term filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan bahwa pancasila merupakan sebuah sistem pemikiran yang mendalam mengenai Indonesia dalam segala hal. Pancasila merupakan perasan pemikiran mengenai Indonesia yang diwujudkan dalam sila-sila. Artinya, untuk melihat bagaimana Indonesia atau bagaimana Indonesia seharusnya kita bisa melihat dan memaknai Pancasila. Bagaimana manusia-manusia Indonesia kita dapat melihat dan memaknai Pancasila. Bagaimana melihat ekonomi, hukum, budaya, dsb segala sesuatu yang bersangkutan dengan Indonesia kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat dan memaknai Pancasila.

Kedua, memaknai Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dengan menitik beratkan pada term sistem. Sebagai sebuah sistem filsafat Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terbentuk dari bagian-bagian pembentuknya yang berupa sila-sila, yang masing-masing sila-sila yang dimaksud mempunyai fungsi sendiri-sendiri tetapi sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu dan lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan tujuan untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.

Dari kedua uraian di atas mengenai pemaknaan Pancasila sebagai sistem filsafat, maka kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, dimana masing-masing sila tidak dapat

¹⁴ Untuk dapat memahami mengenai aspek-aspek yang disebutkan dalam uraian lihat Syahrial Syarbaini, 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor., Kaelan, *Op.cit.*, Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.

¹⁵ Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid, 2018, *Pendidikan Pancasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 46.

dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.

Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan yang dimaksud adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Hal tersebut untuk mencapai sebuah cita-cita terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

1. Memaknai Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila

Dari pembahasan sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa sebagai sebuah sistem, Sila-sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri walaupun tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Sebagai usaha memaknai sila-sila dalam Pancasila sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila maka kita akan membahas dan memaknai tiap sila dalam Pancasila.

Usaha pemaknaan terhadap tiap sila dalam Pancasila ditujukan untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dalam Pancasila. Untuk itu sebelumnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan nilai.

Menurut Frankena yang dikutip oleh Kaelan adalah Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" (*Worth*) atau 'kebaikan' (*goodnes*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakuan penilaian.¹⁶

Di dalam *Dictionary of Sosciology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*The believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartrager*).¹⁷

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik tidak baik, indah tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan.¹⁸

¹⁶ Kaelan, *Op.cit*, hlm.80.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

a. Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelumnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan perasan dari pikiran yang terdalam mengenai Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa sila-sila dalam Pancasila bukanlah sebuah bentuk ciptaan tetapi merupakan hasil perenungan mendalam dalam melihat Indonesia. Untuk hal itu kita akan melihat sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara historis untuk membuktikan bahwa manusia-manusia Indonesia merupakan bangsa yang religius.

Dari fakta sejarah yang dapat kita lihat sampai saat ini kita dapat melihat bahwa kerajaan-kerajaan sebagai bibit terbentuknya negara Indonesia merupakan kerajaan-kerajaan yang religius. Bangsa Indonesia menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebagai buktinya hasil peradaban pada masa itu yang masih bisa kita lihat dan sangat megah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Fakta sejarah yang dimaksud sebagai contoh adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan, selain itu Masjid-Masjid yang sampai sekarang masih berdiri yang dibangun sebelum bangsa Indonesia merdeka. Pada masa setelah kemerdekaan salah satu bangunan monumental yang didirikan bukan pusat perbelanjaan tetapi tempat peribadatan seperti Masjid Istiqlal.

Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan bahwa Bangsa Indonesia mengenal konsep Tuhan yang merupakan pencipta segalanya sebagai sesuatu yang Tunggal. Artinya hanya ada satu dzat sebagai Tuhan sebagai ujung dari mana semuanya bermula.

Nilai pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuhan merupakan sumber segala nilai yang baik, pedoman bagaimana seharusnya kita sebagai manusia Indonesia bertindak dan berperilaku.

Untuk memaknai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam kata Yang Maha Esa mengandung arti bahwa Tuhan bersifat Tunggal tidak sekutu dalam zat, sifat dan perbuatan-Nya.
- 2) Bahwa Tuhan Yang Maha Esa memiliki sifat yang sempurna sehingga baik sifat maupun perbuatan-Nya tidak dapat disamai oleh siapa/apapun.
- 3) Di negara Indonesia tidak dibenarkan adanya paham-paham yang mengingkari eksistensi Tuhan.

Pada hakikatnya pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama, sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa., sehingga adanya manusia merupakan akibat dari adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasi, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Berdasarkan pembahasan ini maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya.

b. Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Tuhan mengajarkan bagaimana manusia Indonesia harus bersikap terhadap manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid mengemukakan Kemanusiaan Yang adil dan Beradab dengan sangat mendalam sebagai berikut bahwa:

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila ke-2 telah disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia).¹⁹

Hal di atas dapat dimaknai bahwa sebagai Manusia Indonesia kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia, karena posisi kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua memperlakukan manusia dengan beradab sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Artinya selain bersikap adil, kita juga harus bersikap dengan adab yang baik. Dalam praktek yang nyata misalnya tidak dibenarkan kita mencemooh sesama manusia hanya karena berbeda Suku, Agama, Ras dan Golongan.

Adil dalam hal ini berarti memperlakukan manusia sesuai dengan sesuatu yang seharusnya. Dalam pengertian yang demikian apakah kita akan memperlakukan manusia dengan konsep sama atau berbeda tergantung dari apakah sama itu sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan atau tidak, begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya kita membahas bagaimana nilai- dari sila ke-2 berkaitan dengan sila-sila yang lain dalam Pancasila Sebagai berikut:

Manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari oleh dan untuk manusia oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama, Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (Persatuan Indonesia), sila keempat (kerakyatan), serta sila kelima (Keadilan Sosial). Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna sebagai berikut: rakyat adalah sebagai pokok unsur negara dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara adalah disebut rakyat sebagai unsur pokok Negara, serta terwujudnya

¹⁹ Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid, *Op.cit*, hlm. 55.

keadilan bersama adalah: keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.²⁰

c. Sila Ke-3 Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah, persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Makna persatuan dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah *persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia*. Bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang berdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan peramaian dunia yang abadi.²¹

Untuk memaknai nilai dalam sila ke-3 tidak terlepas dari sila-sila sebelumnya. Mengani hal ini Kaelan menemukan sebagai berikut:

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika.²²

Dari pendapat Kaelan di atas dapat kita maknai bahwa kesejatan Indonesia ada pada perbedaannya. Indonesia terbentuk di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Usaha untuk membuat keberagaman menjadi keseragaman yang ada di Indonesia dapat dimaknai sebagai usaha untuk menghilangkan esensi Indonesia. Untuk itu usaha untuk membuat Negara Indonesia hanya berdasar pada satu agama merupakan usaha yang bertentangan dengan Pancasila dan mencederai cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaitannya sila ketiga dengan sila-sila yang lainnya maka dapat dipelajari hal-hal yang dikemukakan Kaelan sebagai berikut:

Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Serta mendasari dan menjiwai. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan dan sila Kemanusiaan,

²⁰ Kaelan, *Op.cit*, hlm.,. 58

²¹ Syahril Syarbaini dan Aliaras Wahid, *Op.cit*, hlm. 56.

²² Kaelan, *Op.cit*, hlm. 75.

Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam persekutuan hidup yang disebut negara. Maka pada hakikatnya yang bersatu adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu sebagai rakyat sehingga rakyat adalah unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sehingga sila ketiga mendasari sila keempat dan sila kelima.²³

d. Sila Ke-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Pemaknaan terhadap sila ke-4 Pancasila tidak bisa terlepas dari sila-sila sebelumnya. Untuk hal tersebut Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Bucky Krisnayudha mengemukakan hal sebagai berikut:

hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakikat makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan daripada rakyat, keseluruhan jumlah warga sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak wajib demokrasi kepentingan atau fungsional dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal Negara dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani, rohani, religius, atas dasar tritunggal: satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua.²⁴

H.A.W. Widjaja memberikan pemaknaan yang lebih operasional berkaitan dengan sila ke-4 sebagai berikut:

Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak dipertentangkan. Perbedaan seyogyanya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapat mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 58-59

²⁴ Bucky Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 59.

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.

Nilai filosofis yang terkandung dalam sila ke-4 adalah bahwa pada hakikatnya negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam kerakyatan mengandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila ke-4 adalah demokrasi yang tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu.

Demokrasi dalam sila ke-4 adalah demokrasi yang berdasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan dan nilai persatuan. Oleh karena itu demokrasi yang didasari hikmat kebijaksanaan meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat, dengan didasari oleh moral kebijaksanaan untuk kehidupan bersama yang harmonis, bukan persaingan perasingan bebas dan menguasai yang lainnya.

Oleh karena itu asas-asas dalam sila ke-4 adalah:

- 1) Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat bangsa maupun moral terhadap Tuhan Yang Mah Esa;
- 2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
- 3) Menjamn dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama;
- 4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia;
- 5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama.
- 6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab;
- 7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab
- 8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu kedilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama.

Dari dua pemaknaan sila ke-4 Pancasila di atas lebih lanjut kita dapat memaknai bahwa tujuan musyawarah untuk mencapai mufakat hanya dapat terwujud apabila didasari dengan rasa persatuan. Dibutuhkan nilai persatuan dalam setiap permusyawaratan yang dilakukan. Dengan adanya rasa persatuan dapat diartikan juga bahwa musyawarah yang dilakukan selalu dilandasi sebagai upaya untuk mencapai solusi untuk kepentingan bersama, bukan memaksakan kehendak pribadi atau golongan.

e. Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam pembahasan mengenai nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kansil mengutip Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Isi pidato yang dimaksud khususnya pada bagian mengenai bagaimana sebenarnya prinsip kesejahteraan Indonesia itu. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penhisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan; semuanya bahagia cukup sandang pangan.²⁶

Konsep keadilan sosial yang dimaksud oleh Soekarno di atas merupakan konsep kesejahteraan yang berbeda dari yang lain. Kesejahteraan yang dimaksud bukan konsep persaingan bebas seperti pada liberalisme. Yang harus dicapai adalah sejahtera semua, artinya harus ada kerjasama dan saling bantu membantu bukan dengan niatan bersaing secara bebas. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah bisa bekerja sama dengan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

²⁶ Kansil, *Op.cit*, hlm. 107.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan bagaimana pemaknaan Pancasila sebagai sistem Filsafat!
2. Berhubungan dengan aspek politik, bagaimana seharusnya para pelaku politik di Indonesia dalam menjalankan kehidupan politiknya?
3. Apa tujuan besar Pancasila sebagai sistem filsafat?
4. Dalam aspek hukum, Pancasila berkedudukan sebagai apa?
5. Apa yang kita dapat pelajari untuk mengenal kembali bagaimana seharusnya Manusia Indonesia itu?

JAWABAN

1. Sebagai sistem filsafat, kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, dimana masing-masing sila tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.
2. pelaku politik di Indonesia seharusnya memakai cara-cara yang mempersatukan bangsa bukan malah memecah belah. Upaya-upaya yang memanfaatkan perbedaan yang sudah ada dalam bangsa Indonesia seperti perbedaan Agama, Suku, Ras, dan golongan untuk tujuan memecah belah sehingga tujuan politik tercapai, sangat tidak dibenarkan.
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
4. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
5. Untuk mengenal bagaimana manusia-manusia Indonesia sebagai warga bangsa, kita dapat mempelajari dan memahami Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

TUGAS

Susunlah sebuah Esai mengenai budaya gotong royong dari daerah asal anda masing-masing. dalam menyusun esai di dalamnya hubungkan budaya gotong royong tersebut dengan Pancasila sebagai sistem filsafat